

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Literasi keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial dasar bagi setiap orang agar terhindar dari kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan dapat muncul jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan seperti kesalahan penggunaan kredit, tidak mempunyai perencanaan keuangan, dan tidak memiliki tabungan. Situasi tersebut jelas tidak menguntungkan bagi upaya meningkatkan kesejahteraan finansial. Menurut (Akmal, H. & Saputra, 2017) bahwa tingkat kesejahteraan sejalan dengan tingkat literasi keuangan terhadap akses keuangan serta literasi keuangan merupakan langkah mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan pola dan gaya hidup yang mereka jalani. Sehingga, literasi keuangan ini sebagai kemampuan untuk membuat penilaian dan pengambilan keputusan yang efektif mengenai penggunaan dan pengelolaan keuangannya (Schagen & Lines, 1996).

Menurut Chen and Volpe (1998) bahwa literasi keuangan yaitu pengetahuan untuk mengelola keuangan dalam pengambilan keputusan keuangan. Hal ini mencakup bagaimana seseorang mengelola atau mengalokasikan keuangannya bukan hanya untuk kebutuhan saat ini tetapi juga untuk kebutuhan masa depannya. Bahwa literasi keuangan sebagai ukuran sejauh mana seseorang memahami konsep keuangan utama dan memiliki kemampuan dan kepercayaan diri untuk mengelola keuangan pribadi melalui pengambilan keputusan jangka pendek yang tepat dan perencanaan keuangan

jangka panjang secara kompeten, sembari memperhatikan peristiwa kehidupan dan perubahan ekonominya (Remund, 2010). Oleh karena itu, literasi keuangan adalah kemampuan untuk memahami istilah ekonomi dan skema keuangan serta menggunakan informasi tersebut secara efektif langsung ke perilaku (Noctor et al., 1992). Maka, literasi keuangan mencakup kemampuan untuk membedakan antara keputusan keuangan, mendiskusikan uang dan masalah keuangan tanpa rasa tidak nyaman, serta merencanakan masa depan.

Literasi keuangan adalah kemampuan untuk menilai manajemen arus kas dengan lebih baik dan mengambil tindakan yang tepat (Njoroge & Gatungu, 2013). Literasi keuangan mencakup kemampuan untuk mengenali pilihan keuangan yang sehat. Ini adalah landasan yang mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan (Njoroge & Gatungu, 2013). Pengetahuan dan keterampilan keuangan penting dalam usaha apapun atau individu karena setiap keputusan memiliki dampak keuangan. Maka dari itu, pengetahuan keuangan sangat penting, seseorang yang memiliki pengetahuan yang cukup cenderung tidak membuat kesalahan, karena setiap keputusan yang diambil akan dipandu oleh prinsip dan kebijakan yang ditetapkan dengan baik (Sindani, 2019). Oleh karena itu, kurangnya konsep keuangan dasar dapat menyebabkan kegagalan. Telah tercatat bahwa kegagalan untuk secara efektif menjalankan fungsinya pengelolaan keuangan yang luas ini telah memberikan kontribusi besar terhadap tidak meleknnya finansial yang dihadapi.

Di era globalisasi ini literasi keuangan sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan nilai waktu dari uang. Memaksimalkan nilai waktu dari uang

berarti nilai uang sekarang tentu berbeda dengan nilai uang di masa yang akan datang, seseorang harus cerdas dalam mengelola atau menginvestasikan uangnya. Karena itu, literasi keuangan merupakan pengetahuan tentang fakta, konsep, prinsip, dan alat teknologi yang mendasar untuk cerdas dalam menggunakan uang (Garman & Fogue, 2011). Di Indonesia, masyarakat cenderung masih kurang memahami konsep keuangan dan tidak memiliki pengetahuan untuk membuat suatu keputusan keuangan. Maka, Potrich et al., (2016) mengemukakan bahwa literasi keuangan adalah suatu kemampuan seseorang menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pengalamannya dalam hal pengambilan keputusan yang efektif mengenai penggunaan dan pengelolaan keuangan individu untuk menjaga keamanan finansial mereka. Dengan adanya, literasi keuangan maka berharap akan adanya keputusan keuangan yang membuat keamanan finansial mereka terwujud. Selain itu, masyarakat yang literasi keuangan rendah akan berpeluang lebih besar menerima risiko dari produk dan jasa lembaga keuangan tersebut.

Salah satu risiko keuangan yaitu ikut serta dalam kegiatan investasi “bodong” yang berkedok dana tabungan yang memberikan imbal hasil yang sangat menggiurkan dalam rentang waktu yang singkat. Menurut Manarung (2020) kondisi demikian tentu akan menyebabkan masyarakat mudah terjerat dalam masalah keuangan, seperti terlilit hutang yang pada akhirnya akan mempersulit kesejahteraan secara finansial. Pemahaman terkait pengelolaan keuangan yang baik menjadi salah satu jalan keluar dari berbagai macam hambatan yang memberikan imbas negatif pada stabilitas perekonomian

nasional. *US Financial Literacy and Education Commission dalam US National Strategy for Financial Literacy 2020* menggambarkan bahwa literasi keuangan sebagai keterampilan, pengetahuan dan alat yang menjadi bekal bagi individu untuk membuat keputusan dan tindakan keuangan untuk mencapai tujuan keuangan mereka.

Seseorang dikatakan melek keuangan ketika memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut. Sebab, orang yang melek finansial membuat keputusan sehari-hari yang baik dalam mengelola anggaran keuangan (seperti, cara mengalokasikan tabungan, kesadaran risiko, dan manajemen dalam kondisi ekonomi tertentu) (Kurowski, 2021). Menurut Kiyosaki (2008) menjelaskan bahwa literasi keuangan sebagai kemampuan untuk membaca dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan masalah *financial*/keuangan. Karena, literasi keuangan dianggap sebagai kesadaran/pemahaman konsep keuangan, produk/jasa untuk membuat keputusan keuangan yang bijak. Sehingga, mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen dan/atau masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan, (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Untuk mencapai kesejahteraan tersebut masyarakat perlu mengetahui dengan cara apa mencapai kesejahteraan mulai dari perencanaan sampai penggunaan (van Rooij et al., 2012). Apalagi zaman yang kini kaya akan teknologi masyarakat harus pandai dalam mengelola keuangan serta dituntut untuk menguasai perkembangan pasar keuangan. Menurut (Anshika et al.,

2021) pentingnya literasi keuangan menjadi semakin penting karena dimulainya produk/layanan keuangan baru, kompleksitas pasar keuangan, dan lingkungan ekonomi yang berubah dengan cepat. Hal ini, dapat membantu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi.

Literasi keuangan juga tidak hanya sekedar memahami atau mengelola keuangan namun dengan adanya literasi keuangan mampu membuat keputusan yang benar agar tercapainya kesejahteraan finansial yang tepat (Chen and Volpe, 1998). Dari sini perlu adanya literasi keuangan yang dapat membantu seseorang dalam melakukan perencanaan dan juga pengambilan keputusan yang baik agar komponen penting yang dipertimbangkan ketika pengambilan keputusan yang terinformasi dengan baik dipertimbangkan. Oleh sebab itu, seseorang harus memiliki literasi keuangan yang baik atau biasa disebut ilmu pengetahuan yang tinggi. Sebagaimana sesuai dengan hadist sebagai berikut:

أَفْضَلُ النَّاسِ الْمُؤْمِنُ الْعَالِمُ الَّذِي إِنْ اِحْتِيَجَ إِلَيْهِ نَفَعَ وَإِنْ اسْتُعْنِيَ عَنْهُ أَعْنَى نَفْسِهِ
(رواه البيهقي)

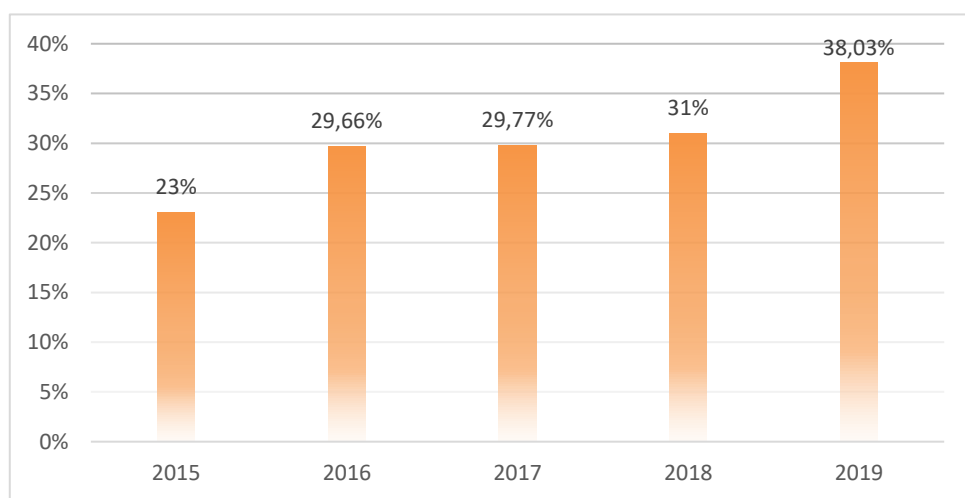
“Seutama-utamanya manusia adalah seorang mukmin yang berilmu. Jika ia dibutuhkan, maka ia memberi manfaat. Dan jika ia dibutuhkan maka ia dapat memberi manfaat pada dirinya sendiri” (HR. Al-Baihaqi).

نُ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

“Barang siapa yang menghendaki (kebaikan) dunia, maka hendaknya ia menggunakan ilmu, dan barang siapa menghendaki kebaikan di akhirat maka

hendaknya menggunakan ilmu” (HR Asy Syafi’i).

Undang-undang No. 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengamanatkan, untuk mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan serta melindungi kepentingan masyarakat dalam berinteraksi dengan industri jasa keuangan. Dalam melindungi kepentingan masyarakat terdapat aspek literasi keuangan yang memerlukan strategi tersendiri dalam implementasinya.



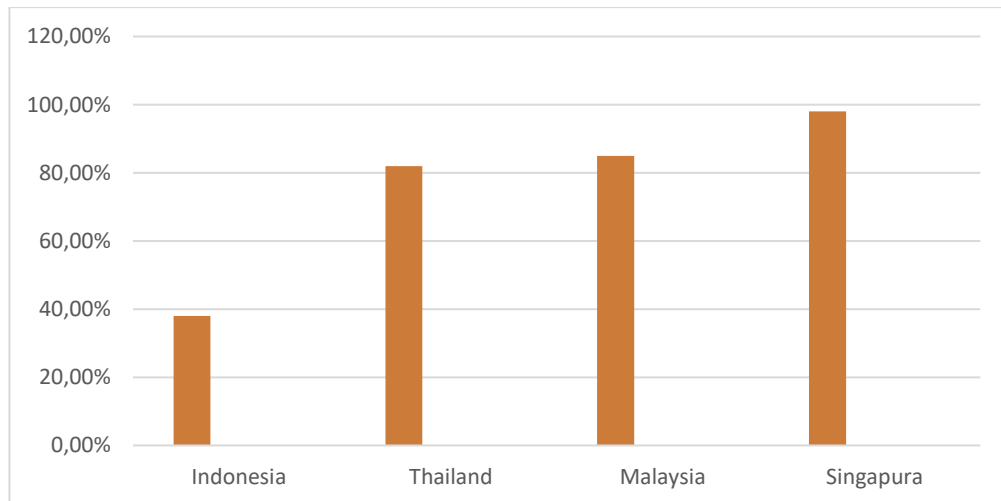
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2019)

Gambar 1.1 Tingkat Pertumbuhan Literasi Keuangan di Indonesia

Berdasarkan data pada gambar 1.1, literasi keuangan Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya, dari semula hanya berkisar 23% pada tahun 2015 naik menjadi 38,03% pada tahun 2019.

Adanya pertumbuhan literasi keuangan di Indonesia berdasarkan tahun ke tahun membuktikan upaya keseriusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengembangkan pengetahuan, pemahaman & konduite keuangan pada warga Indonesia, tapi begitu tingkat literasi keuangan negara Indonesia masih minim dibandingkan negara ASEAN lainnya. *Organisation for Economic Co-operation*

and Development (OECD) dan Otoritas Jasa Keuangan sistematis melakukan survey mengenai tingkat literasi keuangan dari negara-negara yang tergabung dalam G20 termasuk 5 negara dari kawasan ASEAN. Berikut gambar literasi keuangan Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN:



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2019)

Gambar 1.2 Persentase Literasi Keuangan 2019

Dari data gambar 1.2 persentasi tentang literasi keuangan tahun 2019, Indonesia adalah 38,03%. Menunjukkan literasi keuangan Indonesia masih rendah dibandingkan dengan Thailand 82%, Malaysia 85%, dan Singapura 98%. Menurut Solichin selaku sekretaris Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagaimana yang dilansir oleh [cnbc indonesia.com](http://cnbc.indonesia.com), bahwa dengan kondisi literasi keuangan yang rendah, mengakibatkan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia tidak optimal dan akan berdampak buruk untuk kehidupan di masa kini dan masa depan dikarenakan tidak memiliki perencanaan keuangan yang baik terkait kondisi keuangan, tidak memiliki tujuan keuangan untuk keperluan masa depan, dan penempatan produk dan layanan jasa keuangan yang kurang tepat. Maka dari itu,

literasi keuangan perlu dimiliki oleh masyarakat Indonesia untuk memahami dan mengetahui dengan baik karakteristik berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan formal. Literasi keuangan ini merupakan keterampilan yang penting dalam rangka pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan individu, perlindungan konsumen, serta peningkatan inklusi keuangan (OJK, 2021). Untuk peningkatan literasi keuangan disusunlah strategi dalam SNLKI 2021-2025 untuk keberlanjutan beberapa program dari hasil SNLKI 2019, dimana direkomendasikan dari berbagai pihak bahwa, kebutuhan untuk meningkatkan kegiatan literasi keuangan yang berkualitas yaitu dengan, studi literatur mengenai perkembangan konsep, evaluasi kegiatan literasi keuangan yang telah dan sedang berjalan, serta implementasi literasi keuangan di negara lain. (OJK, 2021)

Untuk kesinambungan arah strategi, salah satu cara pemerintahan melalui OJK menyebarluaskan informasi terkait literasi keuangan yaitu dengan menjalankan program SNLKI (Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia). SNLKI terdiri dari 1) Edukasi dan Kampanye Nasional Literasi Keuangan, 2) Penguatan Infrastruktur Literasi Keuangan, dan 3) Pengembangan Produk dan Jasa Keuangan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia, yang diharapkan ketika pengetahuan tentang literasi keuangan dapat memicu proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut Hareva (2019) program ini masih kurang efektif dijalankan karena jika pemerintah saja yang bergerak untuk menyadarkan masyarakat tentang literasi keuangan belum cukup, butuh banyak aspek yang membantu

dalam proses edukasi keuangan ini, salah satunya adalah dari para masyarakat yang mempunyai intelektual dari studinya yang juga dapat membantu pemerintah menyalurkan kepada masyarakat secara umumnya.

Literasi bukan hanya penting bagi pengambilan keputusan keuangan individu dengan beragam latar belakang dan kebutuhan yang berbeda-beda (Chairil & Niangsih, 2020). Literasi keuangan juga penting bagi pelaku UMKM. Bahwa, literasi keuangan adalah salah satu kemampuan yang harus dimiliki pelaku usaha (Latifiana, 2016). Karena, dengan literasi keuangan pengelolaan keuangan dan aset dapat digunakan dan dimanfaatkan seefisien mungkin, termasuk kepada pelaku UMKM.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, dan kontribusi mereka sudah mapan dalam menciptakan lapangan kerja yang efisien dan produktif (Abor & Quartey, 2010). Sektor UMKM yang berkembang dengan baik sangat penting untuk kemandirian lingkungan industri, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang konsisten dan stabil. Literasi keuangan akan memungkinkan dan meningkatkan UMKM dalam lingkungan usaha yang rumit ini dengan memperkuat basis pengetahuan (Jappelli & Padula, 2013). Selain itu, literasi keuangan mendorong proses pengambilan keputusannya, sehingga membantu pelaku usaha untuk beradaptasi dengan perubahan dan memanfaatkan peluang yang muncul dalam perubahan usahanya. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan literasi keuangan memang sangat penting bagi para pelaku UMKM. Menurut (Behrman et al., 2012) mengidentifikasi peran penting literasi keuangan diakui sebagai

kekuatan utama dalam pengambilan keputusan keuangan, serta perencanaan keuangan yang strategis dan berkelanjutan dalam usaha.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah menjelaskan bahwa :

- a) Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
- b) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau afiliasi dari korporasi yang memiliki, menguasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
- c) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dikelola oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki langsung oleh usaha kecil atau usaha besar, yang jumlah kekayaan atau omset tahunannya ditetapkan dengan undang-undang ini.

Selanjutnya, kriteria UMKM dapat dikelompokkan menurut tingkat omzetnya, berdasarkan UU No.20 tahun 2008 tentang UMKM. disajikan dalam bentuk Tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Kriteria UMKM

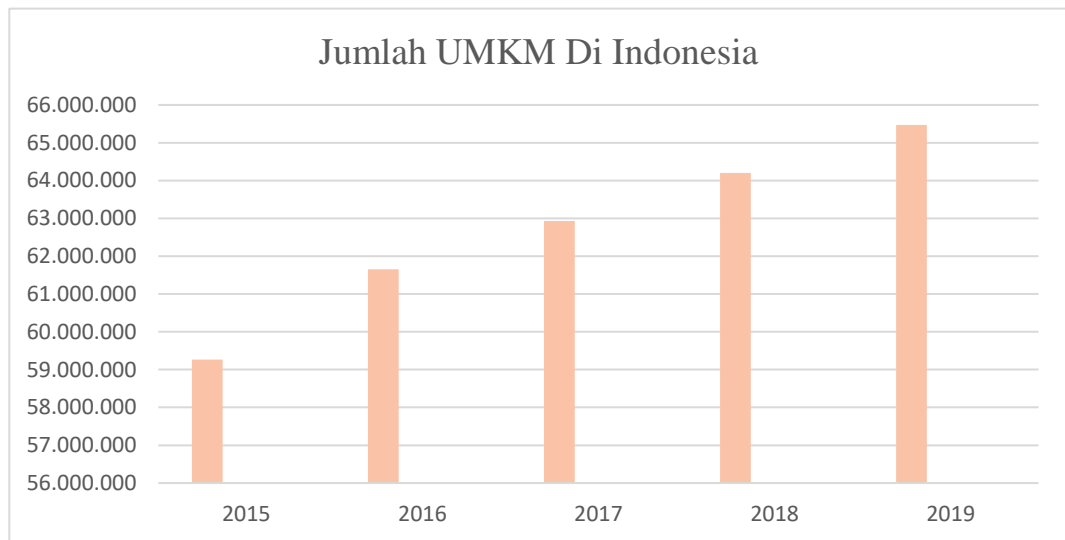
No	Uraian	Aset	Omzet
1	Usaha mikro	Maksimal Rp.50.000.000,-,atau	Maksimal Rp. 300.000.000,-
2	Usaha kecil	Maksimal > Rp.50.000.000,- sampai Rp.500.000.000,-, atau	Maksimal > Rp. 300.000.000,- sampai Rp. 2.500.000.000,-
3	Usaha menengah	Maksimal > Rp.500.000.000,- sampai Rp.10.000.000.000,- atau	Maksimal > Rp. 2.500.000.000,- sampai 50.000.000.000,-

Sumber : UU No. 20 Pasal 6 Tahun 2008 (Badan Pusat Statistik, 2022)

Literasi keuangan juga membantu UMKM menghindari penawaran pembiayaan yang berindikasi penipuan (OECD, 2016). Lagi pula, UMKM dengan tingkat literasi keuangan yang rendah cenderung merasa sulit untuk membuat keputusan tentang sumber pendanaan serta tidak siap untuk menghadapi permintaan potensi pembiayaan atau menegosiasikan persyaratan dari pembiayaan. UMKM memiliki kapasitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis usaha lain. Perihal ini terbukti, dengan terjadinya krisis ekonomi yang cukup besar pada tahun 1998 sampai krisis global pada tahun 2007-2008, dan sektor yang mampu bertahan pada saat itu adalah sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Usaha Mikro Kecil Menengah ini merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Kini, UMKM menjadi suatu komoditi yang kuat di sektor ekonomi karena UMKM menjadi pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Sektor usaha ini perlu

dibina serta diberdayakan karena merupakan penggerak ekonomi kerakyatan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% (kemenkopukm, 2021). Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi (ekon, 2021). Saking pentingnya peran UMKM sehingga menjadi penggerak ekonomi bangsa Indonesia pada saat ini, UMKM inilah yang menjadi pertahanan ekonomi Indonesia saat terjadi krisis dunia. Perkembangan data UMKM dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM RI (2020)

Gambar 1.3 Perkembangan Jumlah UMKM

Berdasarkan data pada gambar 1.3 diatas bahwa jumlah UMKM di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya dan tidak menutup kemungkinan angka ini akan bertambah setiap tahunnya. Meskipun perkembangan UMKM mengalami

peningkatan secara kuantitas, namun kualitas UMKM belum ditingkatkan secara merata seperti halnya pendidikan dan keterampilan pengelolaan keuangannya, sehingga masih banyak UMKM yang kurang produktif karena kurangnya keterampilan keuangan. Menurut gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengungkapkan bahwa, UMKM yang merupakan 90% pelaku usaha di Indonesia umumnya belum mempunyai kemampuan untuk memahami pengetahuan serta keterampilan untuk mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai kesejahteraan. Sejatinya permasalahan dalam menjalankan UMKM tidak terbatas pada manajemen pengelolaan keuangan dan sumber daya yang terbatas semata, namun juga akses permodalan yang dimiliki para pelaku usaha (Bank Indonesia, 2016).

Oleh sebab itu rendahnya tingkat literasi keuangan pelaku UMKM menjadi salah satu penyebab minimnya akses lembaga keuangan terhadap sektor tersebut, pelaku usaha ini akan cenderung kurang mengerti produk-produk keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan lainnya, sehingga hanya mampu bergantung pada pembiayaan perbankan yang manual dan konvensional. Hal ini dikarenakan, rendahnya tingkat literasi keuangan di Indonesia antara lain dipicu kurang imbangnya tingkat pertumbuhan industry jasa keuangan dan kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan. Maka, pelaku usaha khususnya di sektor UMKM, harus memiliki pemahaman bagaimana mengelola dan merencanakan keuangan untuk mendapatkan keuntungan pengembangan bisnis, oleh karena itu UMKM perlu lebih memahami literasi keuangan mereka untuk membuat keputusan keuangan yang cerdas (Abor & Quartey, 2010).

Dalam Rancangan Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2019 yaitu dengan meningkatkan akses pelayanan jasa keuangan bagi masyarakat UMKM untuk meningkatkan perekonomian yang inklusif dan berkeadilan. Namun kenyataannya pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut laporan World Bank “*East Asia and Pacific Economic Update October 2019: Weathering Growing Risk*” akan tetap tumbuh stabil pada angka 5,2 persen pada 2019 dan berlanjut hingga 2021 dengan capaian yang sama (Wildan, 2019).

Dengan kestabilan perkembangan UMKM juga mengharuskan pelaku usahanya untuk siap dalam persaingan dengan UMKM lainnya. Hal ini agar pelaku UMKM menjalankan suatu usaha sudah memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang keuangan untuk mengelola keuangan dan usahanya secara efektif, karena itu literasi keuangan sangat penting bagi pelaku usaha. Bahwa dengan kemampuan seorang pelaku usaha dalam mengenali dan mengakses lembaga keuangan akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan usahanya dan perlu adanya strategi untuk peningkatan literasi keuangan pada pelaku UMKM di Indonesia. Peningkatan literasi keuangan ini diharapkan dapat memberikan dedikasi untuk lebih stabilnya sistem keuangan di kalangan UMKM. Klapper et al., (2012) mengemukakan bahwa peningkatan literasi keuangan akan mengarah pada perilaku peminjam yang lebih bijaksana yang dapat mengurangi kerapuhan keadaan keuangan, meningkatkan permintaan untuk meningkatkan inovasi di sektor keuangan dan memainkan peranan penting dalam memantau keadaan usaha.

Sehingga UMKM memiliki potensi besar sebagai penggerak kegiatan ekonomi masyarakat, dan juga dapat dijadikan tumpuan sumber penghasilan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2023). Dari segi jumlah UMKM yang terus meningkat hingga saat ini, terdapat UMKM yang masih terbatas kemampuannya dalam mengelola keuangan dan dengan keterbatasan itu akan adanya permasalahan yang dialami seperti keterbatasan modal, kurangnya pemanfaatan informasi dan teknologi. Hal ini disebabkan, rendahnya literasi keuangan dalam mengelola keuangan usahanya. Berdasarkan hasil survey Tokopedia pada pelatihan literasi keuangan tahun 2021-2022 bahwa, hanya 60,1% pelaku UMKM yang mengaku membutuhkan materi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan. Fakta ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya khusus untuk meningkatkan literasi keuangan pada UMKM. Maka dari itu, literasi keuangan merupakan hal penting dan wajib dikuasai UMKM untuk memudahkan pengelolaan dan pengembangan usahanya (Panggabean et al., 2018). Karena, dengan sudah menerapkan atau meningkatkan literasi keuangan bisa untuk mengedukasi para pelaku usaha yang sebelumnya pelaku usaha *less literate* atau *not literate* menjadi *well literate*.

Banyak negara yang memprioritaskan atau menggunakan literasi keuangan sebagai kombinasi kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku keuangan yang sehat (Atkinson & Messey 2012). Pelaku UMKM dengan tingkat literasi keuangan yang baik, maka akan memiliki kendala atas kondisi yang terjadi agar tidak salah dalam pengambilan keputusan terkait dengan keuangan, dan kemampuan mempertahankan usaha dengan literasi keuangan yang baik akan

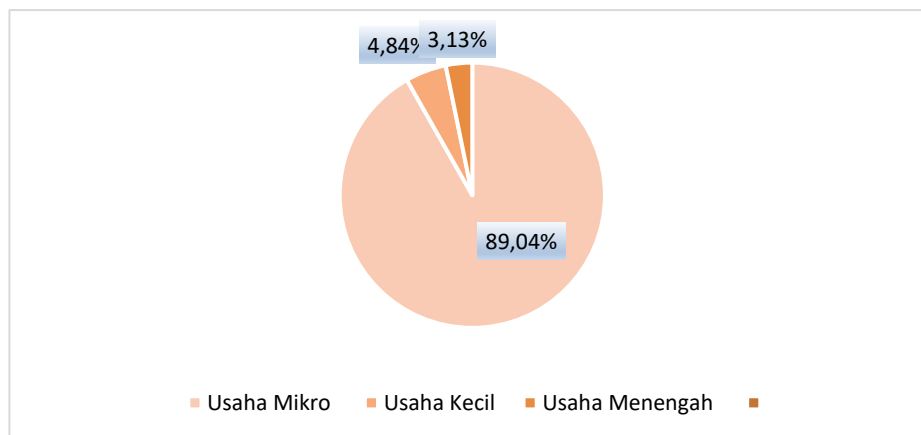
meningkatkan kesejahteraan untuk jangka panjang. Literasi keuangan yang tinggi akan menjadikan pelaku UMKM mahir mengembangkan atau meningkatkan usahanya, karena pemahaman yang ada dalam literasi keuangan ini sangat membantu para pelaku usaha dalam penggunaan produk dan jasa keuangan.

Meskipun peran UMKM begitu penting di Indonesia, hal ini tidak terlepas dari tantangan yang ada. Menurut Millaty (2019) Tantangannya yaitu pelaku usaha masih mengandalkan pencatatan keuangan secara manual sehingga tidak memiliki laporan keuangan yang rapi. Serta, administrasi (masalah administrasi yang sering ditemukan yaitu terkait manajemen usaha, baik manajemen keuangannya, manajemen risiko, dan lain-lain), persoalan modal, dan teknologi. Artinya pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan atau literasi keuangan dalam sebuah usaha sangatlah penting, harapannya dengan tingkat literasi keuangan yang tinggi maka dapat memberikan dampak positif kepada para pelaku usaha atau UMKM (Latifiana, 2016).

Pelaku UMKM berperan langsung dalam menjamin bahwa usaha yang dikelola dengan baik akan menghasilkan keuntungan (Ali et al., 2018). Karena, mereka terlibat langsung dalam pembelian, pengalokasian dan pendistribusian sumber daya secara efisien dan efektif untuk memaksimalkan keuntungan. Penting untuk ditekankan bahwa untuk berhasil dan sejahtera dalam usaha dan untuk bersaing dan bertahan di pasar, pelaku UMKM harus memiliki dan memahami keterampilan keuangan dasar. Menurut Jindrichovska (2013) menekankan bahwa sebagian orang yang memulai bisnis tetapi belum terlibat dalam pengelolaan keuangan, mereka tidak memiliki pengetahuan yang memadai

dalam dokumentasi seperti pencatatan, transaksi, penyusunan, dan analisis laporan keuangan. Dengan kata lain, pelaku UMKM harus cerdas secara finansial dalam aktivitas keuangannya agar mampu mengelola semua aspek usaha untuk mengatasi hambatan yang dihadapinya.

Dalam UU No. 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ialah suatu bisnis yang dikelola oleh seseorang atau badan usaha yang berdiri sendiri dan bukan menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah ataupun usaha besar. UMKM memiliki peran penting dalam pembangunan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, seperti keberadaan sektor UMKM menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga pengangguran dapat ditekan (BKPM ,2022).



Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM (2023)

Gambar 1.4 Tenaga Kerja Nasional

Pada gambar 1.4 menjelaskan menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM (2023) bahwa usaha mikro menyerap sekitar 109,8 juta tenaga kerja (89,04%), usaha kecil 5,93 juta (4,81%), dan usaha menengah 3,79 juta (3,07%), dimana artinya secara gabungan UMKM menyerap sekitar 96,02%. UMKM

tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,67% dengan daya serap tenaga kerja berjumlah 89,04%. Maka, berdasarkan data diatas dari Kementerian KUKM tahun 2020, menyatakan bahwa, Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi baik yang kuat karena jumlah UMKM terutama usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar. Pertumbuhan perekonomian ini sangat membantu usaha mikro dalam perkembangan untuk mencapai kemakmuran yang lebih tinggi. Pemerintah dan pelaku usaha harus mengembangkan usaha mikro menjadi usaha menengah. Selain itu, basis usaha ini telah terbukti kuat selama krisis ekonomi. Usaha mikro juga bersentuhan dengan kebutuhan dasar masyarakat dan memanfaatkan produksi domestik, yang memungkinkan perputaran uang yang cepat. Pemerintah menyadari akan potensi usaha mikro, telah mengambil kebijakan untuk membantu mereka berkembang menjadi usaha menengah dalam beberapa tahun terakhir (djkn kemenkeu, 2020).

Pemberdayaan usaha mikro akan halnya potensi yang besar ini merupakan salah satu sumber pendapatan dalam meningkatkan kesejahteraan. Selain ketahanan bisnis yang luar biasa, sektor usaha mikro ini memiliki keterlibatan ekonomi strategis (Martin, 2022). Usaha yang mampu mengurangi tingkat pengangguran dengan tersedianya lapangan pekerjaan. Menurut Direktur Jenderal Kekayaan Negara kementerian Keuangan (2020), menyatakan bahwa, sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8%. Agar pondasi ekonomi indonesia tetap terjaga dan kuat diharapkan dapat meningkatkan angka tersebut, sehingga tidak hanya bertahan di usaha mikro saja namun mampu berkembang menjadi usaha yang lebih besar. Hal ini menunjukkan, usaha mikro adalah suatu yang harus

diberdayakan secara serius oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah.

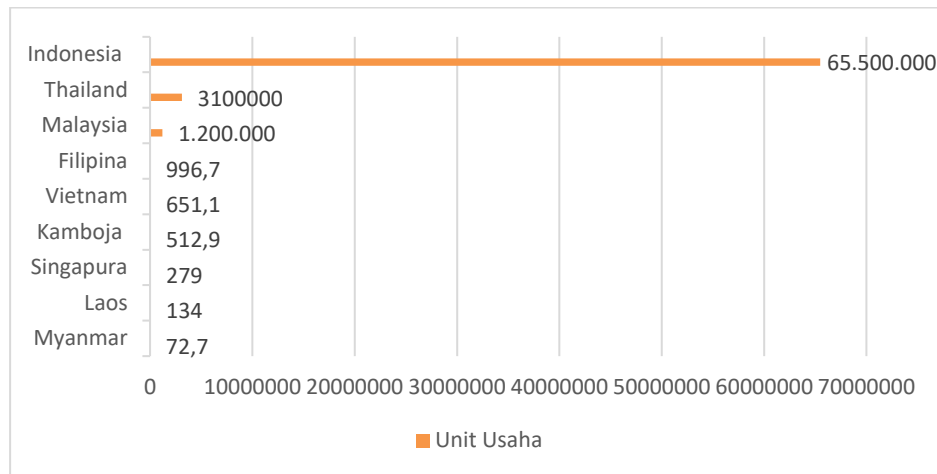
Tetapi, salah satu permasalahan usaha mikro yang dihadapi selama ini dan sulit untuk berkembang yaitu meningkatkan kemampuan keuangan. Terdapat beberapa permasalahan struktural yang perlu diselesaikan sehingga usaha mikro dapat berperan lebih dalam perekonomian nasional (djkn kemenkeu, 2020). Permasalahan tersebut antara lain, kualitas pasar karena mereka menghadapi beberapa masalah internal, yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia seperti kurangnya sumber daya manusia yang terampil, kurangnya orientasi mengelola usaha, rendahnya akses ke perbankan, serta kurangnya informasi keuangan yang rendah. Maka keterlibatan literasi keuangan dinilai penting dalam menentukan keinginan masyarakat untuk mengembangkan usahanya ke kelas menengah atau layanan keuangan lainnya yang belum terakses. Menurut Vitt et al., (2000) Literasi keuangan merupakan kemampuan untuk membaca, menganalisis, mengelola, dan berkomunikasi tentang keadaan keuangan seseorang yang berdampak pada kesejahteraan materi. Hal ini menyangkut, kemampuan untuk penilaian keuangan yang baik, mendiskusikan uang dan masalah keuangan, serta mempersiapkan masa depan dan menanggapi dengan terampil peristiwa kehidupan yang mempengaruhi keputusan keuangan sehari-hari.

Bahkan, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa literasi keuangan dapat mendukung peluang keberhasilan sektor usaha mikro karena pelaku diberikan fleksibilitas untuk mengakses fasilitas keuangan (Aribawa, 2016; Utomo et al., 2020). Usaha dikatakan berhasil dalam pengelolaannya jika kinerja berjalan dengan baik. Kinerja usaha mikro ini melibatkan pertumbuhan sebagai hasil dari

penjualan yang merupakan tujuan usaha (Umogbaimonica et al., 2018). Tetapi, pada umumnya usaha mikro sering mengalami keterlambatan dalam keberhasilannya. Menurut Buchdadi et al (2020) mengemukakan bahwa Sebagian besar usaha sulit untuk berhasil karena berbagai masalah konvensional yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya, seperti masalah kapasitas dan kualitas, sumber daya manusia, pembiayaan, keuangan, dan berbagai masalah lainnya terkait dengan manajemen usaha sehingga hal ini membuat usaha mikro sulit untuk bersaing.

Maka dari itu, diperlukan upaya strategi untuk meningkatkan kinerja usaha mikro. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memperkaya pengetahuan keuangan para pelaku usaha sehingga pengelolaan usaha dapat dipertanggungjawabkan dengan lebih baik sebagaimana layaknya sebuah usaha besar (Sadat & Lin, 2018). Pemahaman tentang literasi keuangan tentunya penting bagi para pelaku usaha mikro dalam mencapai kinerja usahanya, karena faktor dalam meningkatkan kinerja usaha yaitu tentang keterampilan dan pengetahuan bagaimana cara pengelolaan keuangan usahanya.

Menurut *ASEAN Investment Report (2022)* Indonesia memiliki Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terbanyak di kawasan *ASEAN*. Laporan tersebut mencatat jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 65,5 juta unit. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibanding negara-negara tetangga seperti pada gambar 1.4 tersebut:



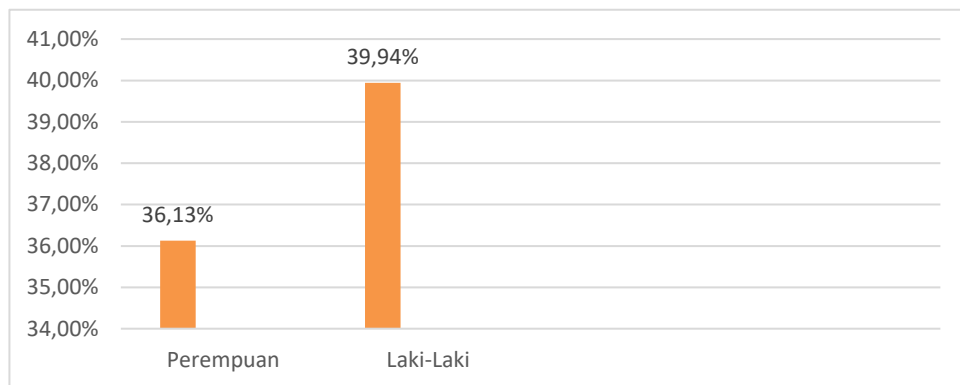
Sumber : *ASEAN Investment Report (2022)*

Gambar 1.5 Jumlah UMKM di Negara Asean

Berdasarkan gambar 1.5 bahwa di negara-negara tetangga, UMKM hanya menyerap tenaga kerja di kisaran 35%-85%. Dimana, Myanmar usahanya 72,700 unit usaha, Laos 133,700 unit usaha, Singapura 279,000 unit usaha, Kamboja 512,90 unit usaha, Vietnam 651,100 unit usaha, Filipina 996,700 unit usaha, Malaysia 1,2 juta unit usaha, Thailand 3,1 juta unit usaha, dan Indonesia 65,5 juta. Tetapi, jika dilihat dari kinerjanya, Indonesia masih kalah dari Myanmar yang Usaha Mikro Kecil Menengah yang mampu menyumbang hingga 69,3% terhadap PDB setempat. Saat ini Indonesia tengah berupaya mendorong peningkatan kinerja UMKM.

Literasi keuangan dapat bermanfaat bagi siapa saja tanpa memandang usia, pendapatan, ataupun faktor demografi lainnya, dengan adanya literasi keuangan ini seseorang dapat memanfaatkan uang secara lebih efektif, mengelola keuangan dengan risiko rendah akan memiliki dampak positif pada kesejahteraan keuangan. Salah satunya, perempuan yang bisa menjadi sasaran literasi keuangan karena

keterlibatan dalam pemenuhan rumah tangga dan memperbaiki tingkat kesejahteraan dalam rumah tangga. Umumnya perempuan bertanggung jawab untuk mengatur keuangan serta harus membuat keputusan keuangan sehari-hari (Setiono & Cecep, 2018). Menurut Chen & Volpe (2002) menemukan bahwa ada perbedaan gender dalam tingkat literasi keuangan. Secara umum, perempuan di Indonesia memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal tersebut seperti dijelaskan pada gambar berikut:



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2019)

Gambar 1.6 Tingkat Literasi Keuangan Berdasarkan Gender

Berdasarkan gambar 1.6 dari hasil survei nasional literasi keuangan Otoritas Jasa Keuangan (2019) perempuan di Indonesia memiliki pengetahuan, keyakinan, keterampilan, sikap dan perilaku keuangan sebesar 36,13% lebih rendah dibandingkan laki-laki sebesar 39,94%. Oleh karenanya, menjadi penting apabila perempuan mampu, berdaya dan menjadi setara dengan laki-laki dalam bidang ekonomi, utamanya dalam memperoleh akses program pelatihan atau literasi terkait pengelolaan keuangan (Kemen PPPA, 2019).

Di era informasi ini, upaya dan peluang perempuan di sektor ekonomi

seharusnya lebih besar karena memungkinkan untuk bekerja dirumah dan berperan dalam ekonomi keluarga. Demi mengoptimalkan kemampuan perempuan dalam mengatur keuangan keluarga, utamanya dalam perencanaan keuangan, pemetaan risiko, hingga menjadi lebih percaya diri dalam mengambil keputusan (Kemen PPPA, 2019). Menurut kepala departemen literasi keuangan dan inklusi keuangan otoritas jasa keuangan, Sondang Martha mengatakan bahwa umumnya, perempuan merupakan penentu arah kesejahteraan ekonomi keluarga.

Padahal saat ini urusan keuangan bukan saja menjadi dominasi kaum laki-laki. Semakin banyak perempuan pekerja menganggap bahwa literasi keuangan penting bagi semua orang tanpa terkecuali. Selain itu, kemampuan mengelola keuangan dengan baik juga mendukung pertumbuhan kesejahteraan dan juga membantu mengelola keuangan keluarga. Dengan memiliki literasi keuangan itu akan membantu seorang perempuan mempunyai konsep dasar keuangan yang lebih baik. Maka, hal inilah yang melatarbelakangi diluncurkannya Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada juni 2020. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman atas akses layanan keuangan formal bagi masyarakat, termasuk perempuan. Menurut Kim & Sherraden (2014) perempuan dianggap bahwa produktivitasnya lebih rendah dibandingkan produktivitas yang dilakukan oleh laki-laki. Karena, pentingnya peranan perempuan dalam mengelola keuangan keluarga dan juga peran perempuan yang sangat penting dalam memberikan Pendidikan atau edukasi keuangan terhadap anak-anaknya. Untuk memiliki keterampilan mengelola keuangan keluarga dan juga sangat penting peran perempuan dalam memberikan pendidikan atau edukasi keuangan kepada anak-

anaknya (Friderica, 2022). Itu sebabnya, perkara pemahaman tentang keuangan tidak lagi dianggap tabu untuk diketahui dan dikelola oleh perempuan.

Perempuan memiliki literasi keuangan yang rendah pada ukuran tertentu, seperti sikap keuangan, pengetahuan, atau perilaku keuangannya. Karena, perempuan lebih mungkin untuk mengalami stress ketika berhadapan dan bertanggung jawab pengelolaan keuangannya (ANZ, 2015). Menurut Khotimah & Isbanah (2019) bahwa, perempuan yang bekerja sekaligus memiliki tanggung jawab mengurus dan mengelola rumah tangga tentunya memiliki pengambilan keputusan keuangan yang lebih kompleks. Selain, bekerja atau menambah ekonomi keluarga, mereka juga dituntut untuk mengelola keuangan pribadi setiap harinya.

Menurut Kemen PPPA (2019) menyatakan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan perempuan salah satunya adalah meningkatkan peran perempuan di dunia kerja sebagai penopang ekonomi. Perempuan tidak lagi berkulat hanya sebagai pengelola keuangan saja, bahkan bisa lebih dari itu. Apalagi kaum perempuan Indonesia memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian negara yang semakin hari semakin signifikan. Pada sektor Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro, 53,76% pelakunya perempuan dan 97% pekerjanya pun perempuan. Sementara itu, kontribusi UMKM perekonomian nasional ialah 61%. Pada bidang investasi, kontribusi perempuan 60% (Menkeu, 2021). Hal ini menggambarkan bahwa literasi keuangan dan kapasitas perempuan untuk berpikir cerdas, bisa mengamankan dana bagi keluarga, dan menginvestasikan di bidang produktif sangat potensial dan nyata. jadi, tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa

perempuan tidak hanya memiliki potensial, tetapi secara aktual mampu berkontribusi. Meskipun, kemandirian perempuan belum didukung oleh keahlian dalam mengelola keuangan (Menkeu, 2021).

Oleh karena itu, literasi keuangan untuk perempuan harus dilakukan secara berkelanjutan agar dapat memberdayakan perempuan Indonesia dalam mengelola dan mewujudkan keuangan yang bijak serta membangun masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan literasi keuangan yang sejahtera secara menyeluruh. Dalam upaya optimalisasi peran perempuan menuju kesetaraan dalam bidang ekonomi, maka keterlibatan dunia usaha sangat dibutuhkan. Melalui berbagai program atau pelatihan yang sudah dirancang oleh pemerintah melalui OJK maka, diharapkan perempuan menjadi lebih paham dalam merencanakan, mengelola, dan memproteksi keuangan dengan lebih baik.

Jika dilihat dari jumlah usaha yang ada di Indonesia, 99% didominasi oleh UMKM, yaitu sebesar 64,2 juta pelaku usaha. Dari jumlah tersebut sebanyak 37 juta UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan (Kominfo, 2021). Karena itu, perempuan memiliki peran yang tidak dapat dipandang sebelah mata dalam partisipasinya untuk menggerakkan roda perekonomian. Akan tetapi, literasi keuangan yang dimiliki pelaku UMKM perempuan masih terbilang rendah (Kamila, 2017). Karena, UMKM perempuan belum sepenuhnya memiliki akses pada informasi layanan keuangan. Hal ini, perlu menjadi perhatian khusus agar para pelaku usaha perempuan dalam skala UMKM dapat juga meningkatkan kecerdasannya akan perencanaan keuangan dan dapat menikmati layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan mereka. Maka MenKop UKM menargetkan

jumlah pelaku usaha perempuan dalam ekosistem ekonomi Indonesia harus terus meningkat. Data yang telah menunjukkan bahwa persentase perempuan yang bekerja di sektor informal khususnya pada UMKM sangatlah besar, jadi UMKM juga berperan penting dalam hal menyerap Sebagian besar tenaga kerja perempuan yang ada di Indonesia (Kemenaker, 2022)

UMKM dalam penelitian ini berada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berfokus pada usaha mikronya. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan suatu provinsi yang istimewa makna istimewa ini yaitu dari segi pemerintahan, budaya, serta masyarakat provinsi D.I Yogyakarta. Berbicara Yogyakarta berarti kita berbicara tentang budaya dan kreativitasnya, banyaknya kreatifitas yang lahir dan terbentuk dari provinsi ini. Selain sektor pariwisata, kuliner, dan lain-lain, kreatifitas warga D.I Yogyakarta inilah menjadi ujung tombak perekonomian itu sendiri. Perkembangan UMKM D.I Yogyakarta bertambah pesat. Survey yang dilakukan dinas koperasi dan UKM DIY, jumlah UMKM di Yogyakarta dari tahun 2018 sebanyak 259,581 unit skala usaha, pada tahun 2019 menjadi 262,130 unit skala usaha, untuk tahun 2020 sebanyak 287,682 unit skala usaha dan mengalami peningkatan pada tahun 2021, yaitu sebanyak 329,719 unit skala usaha (bappeda, 2021)

UMKM yang terdapat di D.I Yogyakarta ini tersebar di lima kabupaten kota. Berdasarkan, survei Dinas Koperasi dan UMKM, dapat dilihat dari tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 UMKM yang terdapat di Kabupaten D.I Yogyakarta

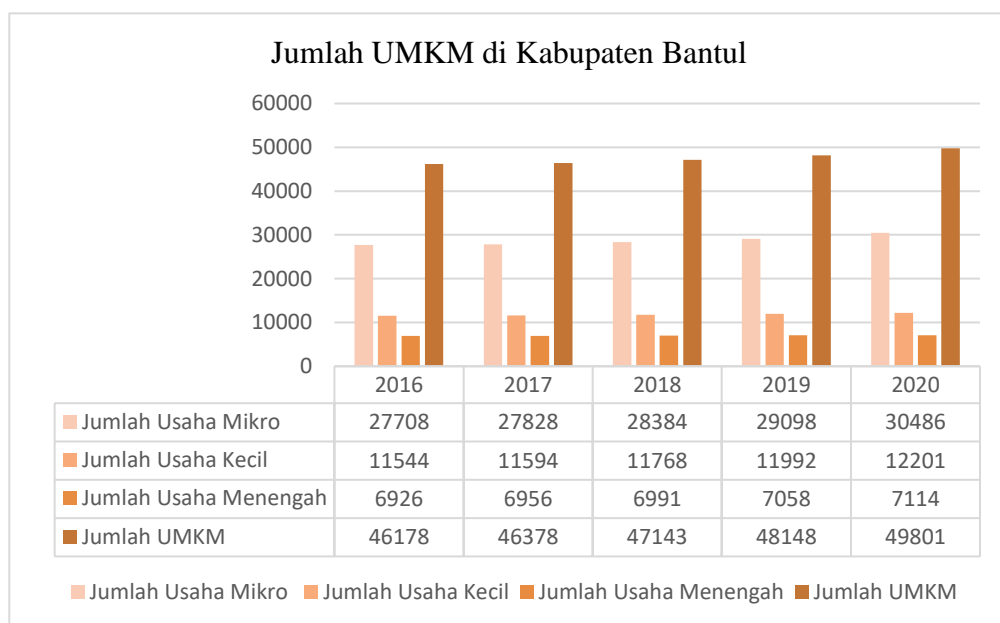
No	UMKM yang Terdapat di lima Kabupaten D.I Yogyakarta	Persentase
1	Kabupaten Bantul	26 %
2	Kabupaten Gunungkidul	22 %
3	Kabupaten Kulonprogo	20 %
4	Kabupaten Sleman	18 %
5	Kota Yogyakarta	14 %
	Total	100 %

Dilihat dari titik distribusi UMKM di Yogyakarta terdapat di kabupaten Bantul. Hal ini menarik untuk diteliti pada sektor UMKM terfokus pada usaha mikronya nantinya yang ada di kabupaten Bantul. UMKM Bantul ini ternyata memberikan sumbangan yang tak sedikit untuk pendapatan domestic Kabupaten Bantul (DKUKMPP, 2022). Berdasarkan data BPS tahun 2019 UMKM menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Brito (PDRB). Menurut DKUKMPP (2022) mengatakan bahwa UMKM itu memberikan persentase yang besar terhadap PDRB di Bantul. Keseluruhan UMKM itu ada 15,18% yang menempati urutan pertama dan tertinggi dengan memiliki beragam UMKM. Kabupaten Bantul pernah dinobatkan sebagai 1 dari 15 Kabupaten/Kota kreatif di Indonesia.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah unggulan Provinsi Yogyakarta, terdapat banyak sekali peluang ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Yogyakarta dari kabupaten Bantul, mulai dari sektor pertanian, perdagangan, sektor pariwisata, kulidan sektor industri kreatif (dpmpt, 2021). Kapasitas perekonomian Kabupaten Bantul terus mengalami pertumbuhan ke arah positif sejak tahun 2017 hingga mencapai puncaknya sebesar

5,53% pada tahun 2019, sehingga hal ini memberikan dampak terhadap perekonomian hal inilah yang membuat pemerintahan Provinsi Yogyakarta semakin terfokus pada pengembangan potensi UMKM dan industri di wilayah Kabupaten Bantul (RLPPD, 2021)

Dilihat dari Misi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul DKUKMPP (2022) “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Difokuskan Pada Percepatan Pengembangan Perekonomian Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan”, yang artinya Kabupaten Bantul ini benar-benar serius mengelola sektor-sektor yang menciptakan produk-produk yang unggul nantinya, termasuk UMKM. Kabupaten Bantul ingin mewujudkan kreatifitas, daya saing UMKM dan penguatan UMKM Bantul itu sendiri. Jumlah perkembangan UMKM di Bantul juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, bisa dilihat dari gambar berikut:



Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian (2020).

Gambar 1.7 Jumlah UMKM di Kabupaten Bantul

Dilihat dari gambar 1.7 di atas bahwa jumlah UMKM di kabupaten Bantul setiap tahun mengalami peningkatan dan didominasi usaha mikro, walaupun peningkatan itu tidak terlalu signifikan, jumlah UMKM di kabupaten Bantul tersebut bisa menjadi perkembangan perekonomian di Bantul, dengan cara pengelolaan usaha yang dapat konsistensi dan berkembangnya suatu usaha, maka dari itu dibutuhkannya pemahaman dan pengetahuan tentang literasi keuangan. Karena literasi keuangan berpengaruh positif kepada perkembangan usaha mikro itu sendiri.

Usaha mikro di kabupaten Bantul ini dikhususkan untuk para pelaku usaha mikro perempuan. Karena, usaha mikro perempuan di kabupaten Bantul ini masih perlu untuk dibekali lebih dalam tentang literasi keuangan agar mendorong berbagai ketahanan dan pemulihan usaha mereka disaat menghadapi berbagai tantangan yang berat di berbagai kondisi serta meningkatkan agar usahanya meningkat ke kelas menengah. Apalagi, perempuan menjadi kelompok masyarakat yang paling terdampak dan cenderung beresiko kehilangan pekerjaan (Tribunjogja, 2021).

Tabel 1.3 Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul

Jumlah Tenaga Kerja	Tahun 2019		Tahun 2020				Tahun 2021					
	Perempuan	%	Laki-laki	%	Perempuan	%	Laki-laki	%	Perempuan	%	Laki-laki	%
Usaha Mikro	90.888	32%	53.539	26%	94.463	34%	71.098	33%	5.788	91%	16.246	96,6%
Usaha Kecil	95.530	34%	76.338	37%	95.247	35%	77.565	36%	502	8%	524	3,1%
Usaha Menengah	95.163	34%	77.931	38%	85.222	31%	68.591	32%	85	1%	54	0,3%
Total	281.581	100%	207.808	100%	274.932	100%	217.254	100%	6.375	100%	16.824	100%

Sumber: bappeda.jogjapro (2021)

Berdasarkan tabel 1.3 berikut ini menunjukkan bahwa jika dilihat dari kontribusi usaha mikro perempuan di kabupaten Bantul, merupakan kabupaten dengan kontribusi usaha mikro terbesar, dengan ini diharapkan usaha mikro perempuan di kabupaten Bantul dapat dijadikan salah satu alternatif masalah, seperti pengangguran. Hal ini tanpa disadari menunjukkan bahwa perempuan memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian daerah. Akan tetapi, besarnya jumlah tenaga kerja perempuan ini tidak didukung dengan kualitas pengetahuan dan keterampilan akan pengelola keuangan, sehingga masih banyak usaha yang kurang produktif dikarenakan rendahnya pengetahuan akan keuangan. Para pelaku usaha khususnya dibidang usaha mikro seharusnya sudah mengerti bagaimana pengelolaan dan perencanaan keuangan sehingga bermanfaat dalam mengembangkan usahanya, sebab itu literasi keuangan sebenarnya harus lebih dipahami pelaku usaha agar pengambilan keputusan keuangan dapat dilakukan secara bijak (kukm.babelprov, 2022).

Permasalahan tentang pengetahuan dan pemahaman pengelolaan keuangan adalah faktor paling penting dalam konsistennya sebuah usaha meskipun dengan modal besar, tetapi tanpa ilmu dan pengetahuan yang baik tentang keuangannya akan rugi atau tidak adanya kesejahteraan finansial. Hal ini akan menjadi masalah kompleks ketika literasi keuangan ini dipandang sepele oleh para pelaku usaha, sebagai usaha mikro yang menjadi ujung tombak perekonomian (dinkop-umkm.jatengprov, 2022). Hal ini jangan sampai menjadi boomerang terhadap usaha mikro pelaku perempuan di kabupaten Bantul itu sendiri.

Maka dari itu, penelitian ini perlu untuk diteliti lebih dalam lagi supaya dapat memberikan kontribusi kepada pelaku usaha mikro perempuan dalam memahami, mengetahui, dan memiliki manajemen keuangan yang cukup, karena dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik akan membantu para pelaku usaha mikro perempuan dalam membuat perencanaan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga diharapkan dengan menerapkan hal ini dapat membuat kesejahteraan dalam keuangannya (Kim & Sherraden, 2014).

Tinggi rendahnya tingkat literasi keuangan bertautan dengan banyaknya faktor seperti, faktor ekonomi, faktor demografi atau faktor internal seseorang menjadi faktor dasar yang mempengaruhi literasi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan serta pengambilan keputusan keuangan yang rasional. Berdasarkan fenomena di atas maka ditemukan beberapa variabel yang mempengaruhi literasi keuangan, antara lain lama usaha, tingkat pendidikan

dan tingkat pendapatan.

Literasi keuangan juga bisa dipengaruhi oleh lama usaha (Panduwinata et al., 2021). Lama usaha adalah lama waktu yang sudah dijalani pedagang dalam menjalankan usahanya (Asmie, 2008) dan lama nya seseorang tersebut dalam berusaha dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang terhadap bidang usahanya termasuk di dalamnya adalah dalam bidang keuangan. Dimana, Lamanya suatu usaha dapat menimbulkan pengalaman berusaha, pengalaman ini dapat mempengaruhi pengamatan seseorang dalam bertingkah laku (Sukirno, 1994). Karena semakin lama usaha tersebut berdiri maka akan semakin banyak pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh pelaku usaha terfokus pada peningkatan skill atau kemampuan mereka. Jika pelaku usaha menjalani usahanya dalam waktu lama, maka pengalaman yang didapatkan lebih banyak serta meningkatkan profesionalitas (Panduwinata et al., 2021).

Tidak hanya itu, seseorang yang mempunyai usaha yang sudah berdiri lama maka semakin banyak pengetahuan keuangan dari lingkungan kerjanya sudah memahami betul dengan produk-produk keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan (Arianti, 2020). karena, memiliki kemampuan akan mengelola apa yang ia miliki untuk bisa berinvestasi dan akses pada produk-produk perbankan. menurut Aziz (2021) bahwa lama usaha berpengaruh positif terhadap literasi keuangan. Semakin lama usaha dijalankan maka semakin banyak pengalaman yang didapatkan oleh pengusaha dan semakin terampil pula dalam mengelola keuangan perusahaan (Isani, 2020). Karena, semakin lama rentang waktu usaha yang telah dijalankan seorang pengusaha, maka ia

akan semakin ahli dalam menyusun strategi kerja termasuk mengelola keuangannya (Bonita & Setiawina, 2017). Pernyataan ini didukung oleh beberapa peneliti, seperti (Isani, 2020), (Panduwinata et al., 2021), (Aziz, 2021). Namun, berdasarkan penelitian terdahulu ditemukan inkonsisten hasil penelitian yang dilakukan oleh (Yusnita, 2018) dan (Ritonga et al., 2020) menyatakan bahwa lama usaha tidak memiliki efek yang signifikan terhadap literasi keuangan.

Literasi keuangan juga bisa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan (Muntahasar et al., 2020). Menurut Van Rooij et al., (2012) berpendapat bahwa orang yang berpendidikan tinggi akan cenderung memiliki keuangan yang lebih baik serta kemampuan untuk mengevaluasi risikonya pun akan baik daripada orang yang berpendidikan rendah. Artinya, Tingkat Pendidikan ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang dititik beratkan pada pemahaman mengenai nilai uang dan penanaman sikap serta perilaku untuk dapat mengatur pemanfaatan uang agar tidak terjadi risiko (Cholid, 2021). Hal ini disebabkan, Seseorang yang memiliki persepsi mengenai pemahaman keuangan akan membentuk sikap dan perilaku positif. Salah satu sikap dan perilaku tersebut adalah mengikuti perkembangan informasi keuangan. Bahwa seseorang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi akan lebih familiar dengan istilah ekonomi dan memiliki pemahaman akan isu keuangan secara umum yang lebih baik (Suryanto & Rasmini, 2018). Semakin tinggi tingkat Pendidikan yang dicapai maka akan semakin banyak pula pengetahuan yang dimiliki seseorang, termasuk pengetahuan tentang keuangan.

Pendidikan memegang peranan penting dalam pembentukan literasi keuangan baik pendidikan informal di lingkungan keluarga maupun pendidikan formal di lingkungan perguruan tinggi. Menurut Fauziyah et al., (2020) tingkat literasi keuangan yang rendah menyebabkan kurang bijak dalam pengalokasian keuangan. Oleh karena itu, mempunyai kecerdasan literasi keuangan akan membantu dalam membuat keputusan yang tepat. Studi Cole & Fernando (2008) mengatakan bahwa tingkat pendidikan yang ada di masyarakat mempengaruhi tingkat pemahaman terhadap keuangan, semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin tinggi pula tingkat pemahamannya terhadap keuangan, Ramadhan, (2018) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan UMKM Kota Yogyakarta. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat literasi keuangan pelaku UMKM Batik Tulis Lasem (Isani, 2020).

Namun, ditemukan inkonsisten pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Suryandani & Tahwin (2020) yang menemukan bahwa tingkat pendidikan tidak signifikan berpengaruh terhadap literasi keuangan. Peneliti lain dari Hinestroza (2018) dan Dewi (2021), menemukan bahwa tingkat pendidikan tidak signifikan berpengaruh terhadap literasi keuangan yang mana tidak semua orang memiliki sifat yang unik dalam pemahaman terhadap literasi keuangannya. Sebab, tingkat pendidikan yang selama ini diperoleh tidak mendukung tentang pengetahuan terhadap literasi keuangan seperti tingkat pendidikan yang dijalani belum menerapkan hal-hal yang berkaitan dengan

keuangan, sehingga hal-hal yang menyangkut dengan literasi keuangan tidak pernah didapatkan sebelumnya oleh seseorang tersebut, atau biasanya seseorang yang memiliki pengetahuan keuangan pada tingkatan yang tinggi, tidak selalu menunjukkan bahwa mereka adalah ahli dalam masalah-masalah keuangan. Begitupun sebaliknya, tidak semua orang dengan pendidikan rendah memiliki literasi keuangan yang buruk sehingga menyebabkan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap literasi keuangan karena, pengetahuan literasi keuangan bisa diperoleh dari mana saja, tidak hanya berdasar pada Pendidikan formal saja,

Literasi keuangan bisa dipengaruhi oleh pendapatan (Suryanto & Rasmini, 2018). Menurut *The Social Research Centre* (2011) bahwa pendapatan mempunyai hubungan yang relatif kuat terhadap pengendalian keuangan, semakin banyak pendapatan keuangan maka semakin baik pengendalian keuangannya. Karena, pengendalian keuangan sangat erat kaitannya dengan literasi keuangan. Itu sebabnya, pendapatan adalah faktor yang paling utama dipertimbangkan seseorang dalam pemahaman tingkat literasinya untuk mengambil keputusan keuangannya (Arianti, 2020). Karena, pendapatan yang mereka terima berbanding lurus dengan aktivitas keuangan mereka. Orang yang berpendapatan tinggi secara inheren lebih ekonomis sebab sumber daya yang tersedia memberi mereka kesempatan untuk bertindak lebih bertanggung jawab. Dengan berapapun pendapatannya jika mampu mengalokasikan keuangannya pada lembaga yang benar maka tidak akan terjadi risiko keuangan melainkan keuntungan dan kesejahteraan akan tercapai

(Manurung, 2020). Menurut Bank Negara Malaysia (2021) menyatakan bahwa orang berpendapatan rendah lebih rentan terhadap kesulitan keuangan. Terbukti, hal ini membuat orang menganggap bahwa pengetahuan tentang manajemen keuangan sama pentingnya bagi seseorang yang potensial dan bercita-cita tinggi untuk mencapai kesejahteraan dan stabilitas keuangan dalam jangka panjang. Kebutuhan untuk memiliki pemahaman yang tepat tentang cara kerja keuangan menjalankan dan melaporkan sangat penting untuk kelangsungan hidup lebih dari kesuksesan yang berorientasi pada keuntungan (Rahim & Balan, 2020).

Dengan demikian, semakin tinggi pendapatan, maka akan berpotensi dalam meningkatkan literasi keuangan. Penelitian ini memiliki kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2019) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang maka semakin baik pula seseorang dalam mengelola keuangan sehingga keputusan yang diambil tepat dan bijak untuk pemahaman tingkat literasi keuangannya (Amalia, 2019). de Bassa Scheresberg (2013) mengungkapkan literasi keuangan meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. karena hal tersebut, menggambarkan besarnya peningkatan pendapatan seseorang jika dapat mengelola dengan baik akan tetap menikmatinya dalam kurun waktu yang lama, berlaku sebaliknya jika memiliki peningkatan pendapatan tapi tidak dapat mengelolanya dengan baik maka seseorang itu hanya dapat menikmatinya sesaat. Karena, kemampuan akan mengoptimalkan sebuah pendapatan dan memanfaatkannya dengan efektif dan efisien keseimbangan finansial dapat terlaksana dengan

baik.

Hal yang sama dikemukakan oleh Hinestroza (2018) bahwa orang yang memanfaatkan pendapatan dengan berusaha melindungi keuangannya berupaya untuk membeli aset yang memberikan passive income yang lebih besar sehingga setiap aset yang dimiliki terus memberikan penghasilan. Banyaknya individu mengalami kesulitan keuangan bukan hanya disebabkan karena pendapatan yang kecil tetapi karena kesalahan dalam pengendalian keuangannya. Menurut ANZ Survey (2011), bahwa pendapatan mempunyai hubungan yang relatif kuat dan positif terhadap pengendalian keuangan, semakin banyak pendapatan maka semakin baik pengendalian keuangan. Karena, mempunyai kecerdasan atau pemahaman tentang literasi keuangan akan membantu dalam pengendalian keuangan dengan bijak. Menurut Arianti, (2020) pendapatan memiliki pengaruh terhadap literasi keuangan Hasil penelitian tersebut sama dengan hasil penelitian dari Siu & Tanusi, (2020) pendapatan secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap literasi keuangan. Pernyataan ini didukung oleh beberapa penelitian, seperti (Arianti, 2020), (Siu & Tanusi, 2020), (Panduwinata et al., 2021), dan (Yusnita, 2018). Namun, ditemukan inkonsisten pada penelitian (Isani, 2020) bahwa pendapatan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap literasi keuangan.

Literasi keuangan menjadi salah satu faktor mempengaruhi kinerja UMKM (Yakob et al., 2021). Jika literasi keuangan tinggi maka proses pengambilan keputusan dan perumusan strategi pun dapat memastikan kinerja usaha yang berkelanjutan. Selain itu, literasi keuangan mampu mengambil

keputusan yang masuk akal dan menciptakan solusi yang inovatif dan efektif demi tercapainya kesejahteraan keuangan untuk peningkatan kinerja usaha (OECD, 2016). Dengan demikian, literasi keuangan yang dimiliki pelaku usaha merupakan kemampuan internal usaha untuk mengakses keuangan yang bertujuan untuk mencapai kinerja yang unggul. Sucuahi, (2013) berpendapat bahwa fondasi keuangan yang baik dapat menjadi ukuran penting keberhasilan kinerja dalam lingkungan usaha yang kompetitif. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Buchdadi et al., (2020) yang menemukan bahwa ada dampak positif literasi keuangan terhadap kinerja usaha mikro, kecil dan menengah. Namun, ditemukan inkonsisten dari penelitian Menike (2019) bahwa tidak adanya hubungan antara literasi keuangan dan kinerja UMKM.

Berdasarkan Permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Lama Usaha, Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Terhadap Literasi Keuangan dan Kinerja Pada Pelaku Usaha Mikro Perempuan di Kabupaten Bantul”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian replikasi ekstensi dari Arianti (2020), Aziz (2021), dan Panduwinata et al., (2021) dengan mereduksi atau mengurangi sikap keuangan, perilaku keuangan, usia, pengalaman kerja, dan modal usaha. Maka yang menjadi pembeda penelitian ini dari ketiga penelitian diatas yaitu penambahan variabel kinerja dari penelitian Buchdadi et al., (2020) serta, selain dari lokasi yang berbeda penelitian ini hanya melihat usaha mikro saja dan lebih mengerucut pada usaha mikro perempuan yang ada di kabupaten Bantul berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Bantul.

B. Rumusan masalah

Untuk itu penulis merumuskan beberapa hal yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah lama usaha berpengaruh terhadap literasi keuangan pada pelaku usaha mikro perempuan di Kabupaten Bantul ?
2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap literasi keuangan pada pelaku usaha mikro perempuan di Kabupaten Bantul ?
3. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap literasi keuangan pada pelaku usaha mikro perempuan di Kabupaten Bantul ?
4. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja pada pelaku usaha mikro perempuan di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Dalam rumusan masalah diatas, ditemukan beberapa tujuan seperti berikut:

1. Menganalisis dan menguji pengaruh lama usaha terhadap literasi keuangan pada pelaku usaha mikro perempuan di Kabupaten Bantul.
2. Menganalisis dan menguji pengaruh tingkat pendidikan terhadap literasi keuangan pada pelaku usaha mikro perempuan di Kabupaten Bantul.
3. Menganalisis dan menguji pengaruh pendapatan terhadap literasi keuangan pada pelaku usaha mikro perempuan di Kabupaten Bantul.
4. Menganalisis dan menguji pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja

pada pelaku usaha mikro perempuan di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu, wawasan, dan referensi khususnya dalam bidang manajemen keuangan khususnya literasi keuangan. Berkaitan dengan pendapatan, lama usaha tingkat pendidikan terhadap literasi keuangan dan sebagai sumber informasi bagi penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini, diantaranya:

- a) Pelaku usaha mikro, penelitian ini sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pengetahuan dan pengelolaan keuangan yang baik.
- b) Pemerintah, sebagai bahan referensi untuk menetapkan suatu strategi yang berguna untuk meningkatkan pemahaman keuangan bagi para pelaku usaha mikro.
- c) Peneliti selanjutnya, penelitian ini sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan meneliti tentang literasi keuangan pada pelaku usaha mikro.

E. Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa luas cakupan pembahasan sehingga dapat menghindari pembahasan masalah yang berlebihan dalam penelitian ini. Batasan penelitian ini, antara lain:

1. Subjek penelitian ini adalah usaha mikro perempuan di Kabupaten Bantul.
2. Objek penelitian ini adalah Kabupaten Bantul.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variabel independen lama usaha, tingkat pendidikan, dan pendapatan. Serta variabel dependennya literasi keuangan dan kinerja.